

UIN Antasari Terima Bantuan Dua Unit Ambulance dari Bupati Balangan



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/uin-antasari-terima-bantuan-dua-unit-ambulance-dari-bupati-balangan/>

Universitas Islam Negeri atau UIN Antasari Banjarmasin, menerima bantuan dua unit mobil ambulance dari Bupati Balangan. Bantuan diserahkan disela wisuda yang digelar Sabtu pagi (27/07). Bantuan diserahkan Bupati melalui Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, diterima Ketua Senat serta Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Dua unit ambulance dari Bupati yang juga alumnus UIN Antasari ini, diharapkan dipergunakan untuk menunjang layanan kesehatan di kampus, baik untuk klinik UIN, mahasiswa, maupun civitas akademika.

Rudiansyah Sofyan mengatakan, berupa dua buah unit mobil ambulance untuk UIN Antasari Banjarmasin ini kemungkinan berdasarkan atas permintaan, dan pak Bupati berkenan memberikan bantuan kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin mudahan ini bisa membantu kelancaran pendidikan di UIN Antasari.

Prof. DR. H. mujiburrahman, MA mengucapkan terimakasih kepada bapak Bupati alumni dan dewan penyantun kami juga beliau memberikan bantuan ini untuk perasional klinik dan ada rencana jg kami akan menggunakannya untuk penyelenggaraan jenazah di kampus satu InsyaAllah kalau klinik kan di kampus satu pusatnya dengan adanya dua ambulance mungkin nanti satu di kampus dua ini. Rektor Pastikan Lulusan UIN Tak Akan Menganggur.

Sementara, dalam wisuda sarjana ke 80 dan wisuda magister serta doktor ke 50, UIN Antasari meluluskan sebanyak 879 orang. Dalam kesempatan ini diberikan penghargaan kepada tujuh wisudawan terbaik dari lima fakultas serta dua pascasarjana magister dan doktor. Lita Rahmadieny, Wisudawati Terbaik mengatakan, sebenarnya gak nyangka juga sih gak berpikiran juga dapat penghargaan gak ada kiat khusus, untuk

melanjutkan pendidikan masih belum tahu tapi setelah selesai ini insyaallah mau bekerja dulu kalau memang ada waktunya bisa melanjutkan pendidikan lagi.

Rektor UIN Antasari berharap para lulusannya mampu menghadapi berbagai tantangan yang menanti dengan kreatif dan inovatif tanpa berdiam diri. Alhamdulillah hasil study kami alumni kami itu ada yang bekerja sebelum tamat ada yang menunggu sampai satu bulan setelah wisuda yang paling lama itu 6 bulan setelah wisuda mereka mendapatkan pekerjaan karena itu saya kira alumni UIN Antasari ini tidak akan pengangguran kedua berbeda dengan orang lain kami mendampingi alumni selama tiga tahun jadi alumni itu walaupun sudah tamat untul pengembangan karirnya itu selama tiga tahun tetap didampingi oleh unit pengembangan karir dan kewirausahaan.

Dari 879 lulusan yang diwisuda, 66 persen diantaranya meraih predikat kelulusan dengan pujian, sisanya sangat memuaskan. sejak berdiri pada tahun 1964 hingga saat ini, UIN Antasari sudah meluluskan sedikitnya 32.627 mahasiswa yang sudah tersebar di beberapa wilayah, termasuk hingga ke luar negeri.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/uin-antasari-terima-bantuan-dua-unit-ambulance-dari-bupati-balangan/>, *UIN Antasari Terima Bantuan Dua Unit Ambulance dari Bupati Balangan*, (15/11/2024)
2. <https://kalimantanpost.com/2024/07/pemkab-balangan-serahkan-dua-unit-ambulance-ke-uin-antasari/>, *Pemkab Balangan Serahkan Dua Unit Ambulance ke UIN Antasari*, (15/11/2024)

Catatan Berita:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteli Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Huruf a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: I) Hibah;

2. Huruf c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Huruf d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
4. Huruf e, Hibah dari badan usaha luar negeri penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. Angka 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Angka 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Angka 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan ,pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Angka 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkap pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan petundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

5. Angka 5) Belanja hibah diberikan kepada;
 - a. Huruf a) pemerintah pusat
 - 1) Angka (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) Angka (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Angka (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) Angka (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) Angka (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan,
 - b. Huruf b) pemerintah daerah lainnya, Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Huruf c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara dibelikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Huruf d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. Huruf e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) Angka (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Angka (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) Huruf (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) Huruf (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) Huruf (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) Angka (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) Huruf (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) Huruf (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) Huruf (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) Huruf (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Huruf a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Huruf b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. Huruf c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Angka (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Angka (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Angka (3) partai politik dan/atau
 - 4) Angka (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- a) Huruf d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya; pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) Huruf e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. Angka 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 8. Angka 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 9. Angka 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.